

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENIPUAN
BERBASIS *ONLINE*
(STUDI KEPOLISIAN RESOR BINTAN)**

**Oleh
Firda Usta Bella
NIM.2105040025**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap dinamika kehidupan sosial, termasuk dalam aspek tindak pidana. Salah satu kejahatan yang berkembang pesat adalah penipuan berbasis *online*, yang semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di wilayah Kabupaten Bintan. Penipuan ini memanfaatkan sarana internet dan media sosial untuk mengelabui korban dengan berbagai modus. Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penegakan hukum terhadap pelaku penipuan *online* masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* di wilayah hukum Polres Bintan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan praktik hukum di lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan *online* di Polres Bintan menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam hal implementasi peraturan perundang-undangan, kurangnya sarana dan prasarana laboratorium digital forensik serta kendala pembuktian akibat jejak digital yang sulit dilacak. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor penghambat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap penipuan berbasis *online* di Polres Bintan belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar Polres Bintan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta melakukan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah meningkatnya laporan penipuan berbasis *online*.

Kata Kunci : Problematika, Penipuan *online*, penegakan hukum

**PROBLEMS IN LAW ENFORCEMENT OF ONLINE FRAUD CRIMES
(A STUDY AT THE BINTAN POLICE DEPARTMENT)**

**By
Firda Usta Bella
Nim.2105040025**

ABSTRACT

The development of information technology has significantly impacted the dynamics of social life, including the realm of criminal activity. One rapidly growing crime is online fraud, which has become increasingly prevalent in society, including in the Bintan Regency area. This crime exploits the internet and social media to deceive victims through various schemes. Although Indonesia has established a legal framework through Law Number 1 of 2024, as the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), the enforcement of law against online fraud perpetrators continues to face numerous obstacles. This study aims to examine the problems in law enforcement regarding online fraud within the jurisdiction of the Bintan Resort Police (Polres Bintan). The research method employed is empirical legal research with a qualitative approach, focusing on observing legal practices in the field through direct interviews. The findings reveal that law enforcement efforts against online fraud in Polres Bintan face several challenges, including limited human resources in implementing legal provisions, inadequate digital forensic laboratory facilities, and difficulties in evidence collection due to hard-to-trace digital footprints. Additionally, the low level of public legal awareness contributes to the hindrance of effective law enforcement. The conclusion of this study indicates that law enforcement against online fraud in Polres Bintan is not yet optimal. Therefore, it is recommended that Polres Bintan enhance the capacity of its human resources and supporting infrastructure, as well as conduct legal education campaigns within the community to prevent the increasing number of online fraud cases.

Keywords: Problems, Online Fraud, Law Enforcement